

Judul : Amanat Undang-Undang : APBN Masih Cukup Untuk Mendanai Pemilu 2024
Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

AMANAT UNDANG-UNDANG

APBN Masih Cukup untuk Mendanai Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS — Ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinilai cukup untuk bisa membiayai penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Apalagi usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu dinilai masih bisa dirasionalisasi. Dengan demikian, alasan penundaan pemilu karena keterbatasan anggaran tidak tepat.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam dalam diskusi bertajuk "Anggaran Pemilu: Menuju Tunda Pemilu?", Senin (14/3/2022), mengatakan, dari jumlah APBN 2022 sekitar Rp 2.700 triliun, besaran belanja negara yang diamanatkan undang-undang, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus hanya 43 persen. Sisanya atau sekitar 57 persen tak termasuk belanja wajib sehingga bisa dipilah alokasi anggaran yang tidak prioritas dan digeser untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilu pada 2022.

Apalagi, anggaran untuk pemilu yang diajukan penyelenggara tidak sekaligus diajukan dalam satu tahun, melainkan beberapa tahun anggaran. Untuk Pemilu 2024, misalnya, diajukan pada tahun anggaran 2022-2025. Besarannya pun hanya 0,5 persen hingga 2 persen dari APBN per tahun.

Ambil contoh, dari usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebanyak Rp 76,6 triliun, dibagi dalam empat tahun, yakni pada 2022 sebesar Rp 8 triliun, pada 2023 Rp 17,4 triliun, pada 2024 Rp 49 triliun, dan pada 2025 Rp 2 triliun. Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kebutuhan anggaran Rp 22 triliun dibagi ke tiga tahun anggaran, yakni pada 2022 sebesar Rp 3,9 triliun, pada 2023 Rp 10 triliun, dan pada 2024 Rp 8,6 triliun.

"Pemilu sudah diatur dalam undang-undang, tetapi proporsi

sinya anggarannya tidak ditentukan. Tidak ada alasan untuk tidak mendanai pemilu," katanya.

Oleh karena itu, Roy meminta pemerintah dan DPR segera memutuskan besaran anggaran untuk para penyelenggara pemilu. Jangan sampai keterbatasan anggaran dijadikan alasan untuk mempersulit pembahasan. Keputusan soal anggaran pun tak perlu menanti pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Ia menekankan, keputusan soal anggaran harus segera disepakati karena tahapan Pemilu 2024 harus sudah dimulai sekitar tiga bulan lagi atau pada Juni 2022. Selain itu, keputusan soal anggaran bisa mengakhiri spekulasi yang beredar bahwa anggaran akan dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024.

Di sisi lain, KPU dan Bawaslu harus lebih transparan dalam menyusun anggaran. Penyelenggara pemilu mesti menyediakan akses dokumen rincian program dan anggaran kepada publik. Penganggarannya pun harus lebih hemat, efektif, dan akuntabel agar tidak ada pemborosan dan ketidakpatuhan penggunaan standar, serta prosedur pelaksanaan anggaran, penyediaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan.

Pinjam ke pemda

Menurut Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu, ada sejumlah pos anggaran yang diusulkan penyelenggara pemilu yang masih bisa dikurangi.

Sebagai contoh untuk KPU, pembangunan sejumlah kantor KPU di daerah dan pengadaan kendaraan dinas bisa ditekankan jika pemerintah daerah (pemda) bisa meminjamkan gedung dan kendaraan dinas untuk KPU. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mesti memfasilitasi dengan mendorong pemda memberikan pinjaman tersebut.

Pemilu sudah diatur dalam UU, tetapi proporsi anggarannya tidak ditentukan. Tidak ada alasan untuk tidak mendanai pemilu.

Roy Salam

Selain itu, menyangkut honor badan *ad hoc*, seperti petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara hingga petugas Panitia Pemilihan Kecamatan yang kebutuhannya lebih dari 50 persen anggaran yang diajukan, Badiul meminta agar KPU mengomunikasikannya dengan Kementerian Keuangan. Hal ini agar tidak terjadi ketimpangan honor antardaerah karena setiap daerah memiliki standar upah minimum yang beragam.

Kaji ulang

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, hingga kini, pihaknya masih belum tuntas mengkaji ulang usulan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Pihaknya masih meminta masukan ulang kebutuhan dari seluruh KPU kabupaten/kota terkait dengan analisis anggaran pemilu. "Atas dasar itulah, KPU melakukan *exercise* berdasarkan kebutuhan prioritas," ucapnya.

Pengkajian ulang tersebut dilakukan setelah pemerintah beserta Badan Anggaran (Banggar) DPR berulang kali meminta KPU mengevaluasi dan merasionalisasi usulan anggarannya. Dalam rapat terakhir dengan pemerintah dan Banggar DPR, KPU mengusulkan anggaran Rp 76,6 triliun, sedangkan Bawaslu mengusulkan Rp 22 triliun.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pada prinsipnya Komisi II DPR sudah memberikan per-

setujuan terhadap usulan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU dan Bawaslu. Namun, proses selanjutnya, besaran anggaran itu masih bisa berubah saat pembahasan dengan Banggar DPR dan pemerintah.

Tunggu pelantikan

Selain itu, tahapan, program, dan jadwal KPU bisa saja memengaruhi besaran anggaran pemilu. Problemnya, hingga kini, Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal belum juga disahkan. Meski KPU telah menyelesaikan rancangan peraturannya, sebelum disahkan rancangan aturan itu harus dikonsultasikan dengan Komisi II DPR dan pemerintah.

Meski DPR akan kembali bersidang setelah melalui masa reses pada Selasa (15/3), menurut Doli, rapat konsultasi membahas rancangan PKPU tersebut kemungkinan baru akan dilakukan setelah anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik presiden. Adapun anggota KPU-Bawaslu yang menjabat sekarang habis masa jabatannya pada April 2022.

"Setelah penetapan PKPU (Peraturan KPU) Tahapan, Program, dan Jadwal, baru kelihatan anggaran finalnya. Karena sudah ada KPU dan Bawaslu baru, mungkin lebih baik pembahasannya dilakukan bersama mereka," kata Doli.

Meski demikian, terkait anggaran, Komisi II DPR akan menanyakan perkembangan pembahasan anggaran ke Banggar DPR. Sekalipun pembahasannya telah melewati siklus pembahasan APBN 2022, DPR akan memberikan perlakuan khusus agar pemerintah bisa mencairkan anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, keputusan terkait anggaran Pemilu 2024 akan dituntaskan setelah PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 disahkan. (SYA)